

PERANAN UNITLANTAS DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALULINTAS MASYARAKAT PADA POLSEK MUARA JAWA

Agus Suparta¹

Abstrak

Agus Suparta. *Peranan Unitlantas Dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalulintas Masyarakat Pada Polsek Muara Jawa, di bawah bimbingan Drs. Heryono Susilo Utomo, M.Si selaku pembimbing I dan Hj. Hariati, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II.*

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peranan Unitlantas Dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalulintas Masyarakat Pada Polsek Muara Jawa serta faktor kendala atau penghambat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Fokus penelitian ini yaitu Peranan Unitlantas Dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalulintas Masyarakat Pada Polsek Muara Jawa yang dilihat melalui Registrasi dan Identifikasi Kendaraan dan Pengemudi, penegakan hukum, pendidikan masyarakat tentang lalulintas serta faktor penghambat atau kendala dalam melaksanakan ketertiban berlalulintas masyarakat pada Polsek Muara Jawa. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa peranan Unitlantas Pada Polsek Muara Jawa baik dalam Registrasi dan Identifikasi Kendaraan dan Pengemudi, penegakan hukum, pendidikan masyarakat tentang lalulintas telah memberikan hasil yang maksimal dalam ketertiban berlalulintas dikarenakan Unitlantas pada Polsek Muara Jawa telah melaksanakan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh Unitlantas pada Polsek Muara Jawa seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, hingga kendala masyarakat yang tertib berlalulintas.

Kata Kunci : *Ketertiban Berlalulintas, Unitlantas*

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: agussuparta08@Gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya volume kendaraan pribadi baik jenis sepeda motor maupun kendaraan roda 4 di jalan raya dan tidak disertai penambahan akses jalan raya yang memadai untuk menampung banyaknya kendaraan pada saat ini memberikan dampak negatif bagi semua pengguna jalan. Kemacetan dan angka kecelakaan yang tinggi merupakan dampak negatif banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya terutama pada waktu masyarakat memulai dan melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu upaya preventif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan harus menjadi prioritas yang diutamakan

Masalah yang terjadi di kecamatan Muara Jawa dalam berlalu lintas yaitu masih banyak terdapat pelanggaran lalu lintas yang merupakan masalah yang harus segera ditangani oleh Polisi lalu lintas Muara Jawa. Yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggar lalu lintas dikalangan Pelajar tingkat SMP dan SMA yang sering tidak teratur dalam menggunakan jalan dan berlalu lintas dan banyak yang belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).
2. Masih terdapat masyarakat yang tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia.
3. Masih terdapat kendaraan roda empat yang sering tidak tertib dalam memakai sabuk keselamatan.
4. Penindakan yang kurang tegas yang dilakukan Polsek Muara Jawa dalam mentertibkan lalu lintas tidak memberikan efek yang jera terhadap pelanggar lalu lintas agar masyarakat tertib berlalu lintas.

Seiring dengan peningkatan profesionalisme kepolisian, tuntutan ke arah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat menjadi agenda reformasi kepolisian. Dengan demikian uraian di atas menarik peneliti untuk meneliti tentang “Peranan Unitlantas dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalulintas Masyarakat Pada Polsek Muara Jawa”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Unitlantas Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas masyarakat ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Unitlantas Polsek Muara Jawa dalam melaksanakan peranannya ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Unitlantas Polsek Muara Jawa di dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas masyarakat.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat bagi Unilantas Polsek Muara Jawa dalam melaksanakan peranannya.

Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan

ilmu pengetahuan yang lebih erat relevansinya dalam ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan mata kuliah pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi para peneliti agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pada kegiatan selanjutnya dan sebagai informasi dalam bentuk penyajian data penelitian untuk referensi bagi masyarakat yang membutuhkan, dan menjadi bahan masukan kepada Polsek Muara Jawa.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Pelayanan Publik

Menurut Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa “Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”. Dalam hal ini pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara.

Menurut Moenir (2010:16-17) “Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”. Pelayanan pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Menurut Pasolong (2008:128) menyatakan “pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”. Dalam hal ini pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah (birokrat) dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peran

Menurut Gross, Mason dan Mc Eachrn (Berry, 2003:106) “peranan adalah seperangkat harapan harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Veithzal Rivai (2006:148) Peran dapat diartikan sebagai Perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan seiring pekerjaan juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Menurut Soekanto (2002:243) “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status)”. Apabila seseorang melaksanakan sesuai dengan kedudukannya, maka ia

menjalankan suatu peran. Peran atau biasa disebut juga peranan (role) memiliki beberapa arti :

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seorang

Kepolisian RI

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 5 ayat 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 5 ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1.

Kepolisian Sektor

Dalam Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 pasal 1 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menyatakan bahwa Kepolisian Sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian diwilayah kecamatan yang berada dibawah Kapolres.

Sedangkan pada pasal 78 Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tertuang bahwa Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban bermasyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Ketertiban

Menurut Kamus Bahasa Indonesia “Ketertiban adalah peraturan di masyarakat/keadaan serba teratur”. (www.kamusbahasaindonesia.org/Ketertiban diakses 10 Maret 2014).

Menurut Poerwardaminta mengatakan bahwa ketertiban adalah aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan teratur baik. (http://www.slideshare.net/septianraha/analisis_pelaksanaan-kewenangan-pemerintahan-desa-dalam-bidang-kemasyarakatan-di-desa-sumare-kecamatan-simboro-kabupaten-mamuju diakses 7 Maret 2014).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 pasal 1 angka 10 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tertuang bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah

daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

Definisi Konsepsional

Peran Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas melalui Unitlantas adalah aktivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dibidang registrasi/identifikasi kendaraan dan pengemudi, penegakan hukum lalu lintas, dan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas..

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan tentang objek yang akan diteliti. Menurut Mukhtar, (2013:11) “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu”. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Menurut Moleong, (2006:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu untuk memberikan batasan-batasan objek yang akan di teliti, yaitu:

1. Peranan Unitlantas oleh polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas terhadap masyarakat :
 - a. Registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan.
 - b. Penegakan Hukum Lalu Lintas
 - c. Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas
2. Faktor penghambat Polsek Muara Jawa dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas.

Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian, sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu penjelasan dari mana asal sumber tersebut. Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian.

Menurut Moleong (2006:131) “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Adapun yang menjadi informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini yaitu Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) kecamatan Muara Jawa, dan informan tambahan dalam penelitian ini yaitu : Polisi lalu lintas dan masyarakat Muara Jawa.

Dalam penelitian ini penunjukkan informan menggunakan tehnik *Purposive Sampling dan Accidental Sampling*. Menurut Sugiyono (2013:53-54) *purposive sampling* adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (dalam Pasolong, 2012:107) *Accidental Sampling* yaitu “suatu teknik penarikan sampel yang paling sederhana, karena peneliti memperoleh sampel dengan cara kebetulan saja di lokasi penelitian dengan tidak menggunakan perencanaan tertentu”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sistematis yang sudah diolah dan dipublikasikan. Data ini berbentuk dokumen-dokumen yaitu profil polsek muara jawa, data pelanggaran lalulintas, data buku keluar/masuk undangan, arsip yang berhubungan dengan objek penelitian, dan buku-buku referensi yang terdapat diperpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku – buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumentasi-dokumentasi yang ada sebagai sumber data.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan dengan metode analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Mukhtar, 2013:135) yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Sektor Muara Jawa merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian diwilayah Kecamatan Muara Jawa yang berada dibawah Kapolres Kutai Kartanegara. Wilayah Polsek Muara Jawa berada di jalan Ir. Soekarno Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa. Didalam Polsek Muara Jawa memiliki pegawai yang jumlah keseluruhannya sebanyak 32 pegawai. Luas wilayah hukum Polsek Muara Jawa yaitu 754,50 km² berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Sanga-sanga
 Sebelah Selatan : Kecamatan Samboja
 Sebelah Barat : Kecamatan Anggana dan Selat Makasar
 Sebelah Timur : Kecamatan Loa Janan

Dalam Polsek Muara Jawa memiliki rincian sumber daya yang jumlah keseluruhannya sebanyak 32 pegawai sesuai bidangnya masing-masing yang dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Berdasarkan Unsur Pimpinan dan Pengawas

No.	NAMA	PANGKAT	KETERANGAN
1.	BAYU KURNIAWAN. SH	IPTU / 87101499	Kapolsek
2.	SUWARSONO	IPDA / 63040831	Wakapolsek
3.	JUMARIN	AIPTU/73070139	Unit Provos

Sumber : Data Kepegawaian Polsek Muara Jawa 2013

Tabel 4.3

Berdasarkan Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan

No.	NAMA	PANGKAT	KETERANGAN
1.	ISNADI	AIPTU / 59121236	Kepala Seksi Umum
2.	ANDRI FEBRIANTO	AIPDA / 74020444	Hubungan Masyarakat

Sumber : Data Kepegawaian Polsek Muara Jawa 2013

Tabel 4.4**Berdasarkan Unsur Tugas Pelaksana Pokok**

No.	NAMA	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
1.	SUKAMTO	Kanit	AIPTU / 67060594	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
	SUDARMAN	Anggota	AIPTU/71040161	
	MELDI ARMEN	Anggota	AIPTU / 62020658	
2.	BAGUS. S	Kanit	AIPTU/ 71080119	Unit Intelkam
	U T O Y O	Anggota	BRIPKA / 79030544	
	DWI CAHYADI	Anggota	BRIGADIR / 85090215	
3.	ZUKIRMAN	Kanit	IPDA / 74050364	Unit Reskrim
	N A R T O	Anggota	AIPTU / 68040478	
	SUMARTONO	Anggota	AIPTU / 72120291	
	ADE DIWO FM	Anggota	BRIPKA / 81090284	
	ABDUL AZIS	Anggota	BRIPKA / 79020803	
	DODY ISKANDAR	Anggota	BRIGADIR/8309 0786	
	I GEDE WIADNYANA	Anggota	BRIGADIR / 87070021	
4.	PURYANTO	Kanit	AIPTU / 68040092	Unit Binmas
5.	SYAFINGI	Kanit	AIPTU / 70070032	Unit Sabhara
	MIMIK CAHYA ADI	Anggota	AIPTU / 68060206	
	LUKAS DA	Anggota	AIPTU/ 58000020	
	WIYONO	Anggota	AIPTU / 67040450	
	YORIM RAOLIKA	Anggota	BRIPKA / 65010957	
	SUBHAN SUNU	Anggota	BRIPKA / 79021132	

	AZIZ RAHMAWANTO	Anggota	BRIPKA / 80071086	
	SUKRI. SY	Anggota	BRIPKA / 62060026	
	BUDI PRIYONO	Anggota	BRIGADIR / 61090018	
6.	ABDUL HAKIM	Kanit	AIPDA / 72080730	Unit Lantas
	IMMANUEL MAROF	Anggota	BRIPKA / 79052040	
	DIDIK ARIFIN	Anggota	BRIPKA / 82060155	
	SISWADI	Anggota	BRIGADIR / 64010001	
7.	-		-	Unit Polair
Jumlah		27 Orang		

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Katertiban Umum Tahun 2013

Analisis Data

a. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan dan Pengemudi

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Kapolsek dan Kanit Lantas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi telah dijalankan, sedangkan untuk urusan perpanjangan BPKB, STNK, TNKB 5 tahun sekali, itu hanya bisa dilaksanakan oleh Samsat Induk di Tenggarong yaitu Polres Kukar, tidak bisa dilakukan di Samsat Pembantu. Dan dalam proses kegiatan kendaraan yang ingin keluar dan masuk ke daerah Muara Jawa Polsek Muara Jawa dapat membantunya dengan melaksanakan proses administrasi yang bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Jasa Raharja. Dan untuk waktu pembayaran pajak atau wajib pajak dilaksanakan pada hari senin – kamis pada jam 08.00 pagi sampai dengan jam 13.00 siang sedangkan hari Jum'at – Sabtu jam 08.00 pagi sampai dengan 11.30 pagi.

b. Penegakan Hukum

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Kapolsek dan Kanit Lantas beserta anggota Unitlantas diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum secara preventif telah dilakukan dengan cara berpatroli untuk memantau lalulintas serta melaksanakan kegiatan pengaturan lalulintas bila terjadi kemacetan dan memberikan himbauan kepada masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, contohnya yaitu memasang spanduk tentang pentingnya berlalulintas, sedangkan pelaksanaan penegakan hukum secara represif telah dilakukan yaitu mengadakan razia pada waktu 2/3 kali dalam sebulan, dengan

penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, dan untuk penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tindakan langsung (tilang), penilangan dilakukan bila pelanggarannya berat jika pelanggaran ringan diberikan peringatan dengan blangko teguran. Kemudian kendala polsek Muara Jawa dalam pelaksanaan penegakan hukum di Muara Jawa adalah kurangnya personil dikarenakan tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Muara Jawa, sehingga pelaksanaan penegakan hukum harus dengan unit-unit yang lain. Kemudian luas wilayah Muara Jawa yang sebagian besar wilayah hukum Polsek Muara Jawa terdiri dari kelurahan-kelurahan yang letaknya cukup berjauhan dan terisolir. Hal ini disebabkan karena banyaknya anak sungai sehingga kegiatan Patroli rutin kekelurahan-kelurahan kurang maksimal dilaksanakan.

c. Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Kapolsek dan Kanit Lantas serta anggota Unitlantas di atas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalulintas telah dilaksanakan dengan cara mengundang ataupun diundang oleh RT, Tokoh Masyarakat, Sekolah, Perusahaan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya berlalulintas, kemudian memberikan himbauan berupa spanduk yang berisi tentang pentingnya berlalulintas. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalulintas terdapat beberapa kendala yaitu kesadaran masyarakat saat dikmas lalulintas cenderung cuek ataupun kurang memahaminya..

d. Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat kendala dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas yang saat ini penertibannya masih dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan sumberdaya manusia atau personil yang menjalankan tugas tersebut masih sedikit. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Kapolsek dan Kanit Lantas diketahui bahwa faktor penghambat yang di alami oleh unitlantas dalam menjalankan kegiatan ketertiban berlalulintas ialah kurangnya personil di unitlantas yang hanya terdiri dari 4 orang, oleh karena itu perlu bantuan dengan unit yang lain serta luas wilayah dan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan personil polsek muara jawa.

Pembahasan

Kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan pengemudi dilaksanakan pada Kantor bersama SAMSAT Pembantu Muara Jawa yang dalam pelaksanaannya mengadakan registrasi perpanjangan STNK hanya untuk pembayaran pajak/wajib pajak pertahunnya saja serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Syarat perpanjangan STNK harus menyertakan fotocopy KTP, Fotocopy STNK pemilik kendaraan, dengan waktu

penyelesaiannya maksimal 30 menit. Sedangkan untuk pembayaran pajak/wajib pajak perlima tahun sekali seperti BPKB, STNK, TNKB hanya dapat di registrasikan pada Kantor bersama SAMSAT Induk yang berada di Tenggarong. Sedangkan untuk waktu pembayaran pajak atau wajib pajak pada kantor bersama SAMSAT Pembantu Muara Jawa dilaksanakan pada hari senin – kamis pada jam 08.00 pagi sampai dengan jam 13.00 siang sedangkan hari Jum'at – Sabtu jam 08.00 pagi sampai dengan 11.30 pagi.

Kegiatan Penegakan Hukum yang terdiri dari upaya preventif meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini Polsek Muara Jawa dalam pelaksanaan penegakan hukum secara preventif telah dilakukan dengan cara pelaksanaan pengaturan lalulintas di Muara Jawa yaitu kegiatan mengamati atau memantau lalulintas pada saat patroli untuk mengatasi kemacetan agar arus lalulintas lancar, pengaturan juga dilakukan pada setiap hari sabtu saat ada pasar malam Polantas Muara Jawa memasang cone/kerucut lalulintas didepan polsek untuk memperlancar arus lalulintas, untuk yang kedua, patroli dilaksanakan 3 kali sehari untuk mengamati lalulintas dan memberi peringatan kepada masyarakat yang ugal-ugalan saat berkendara dan memberikan bantuan pelayanan apabila menemui kecelakaan lalulintas, dan memberikan himbauan kepada masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, contohnya yaitu memasang spanduk tentang pentingnya berlalulintas. Sedangkan Penegakan Hukum yang terdiri dari upaya represif dilakukan dengan kegiatan Penyidikan Kecelakaan Lalu-lintas (*Traffic Accident Investigation*), dan Penindakan terhadap Pelanggaran Lintas (*Traffic Law Violation*). Bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipolsek Muara Jawa secara represif telah dilakukan yaitu mengadakan razia pada waktu 2/3 kali dalam sebulan, dengan penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, dan untuk penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tindakan langsung (tilang), penilangan dilakukan bila pelanggarannya berat jika pelanggaran ringan diberikan peringatan dengan blangko teguran.

Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah luas wilayah Muara Jawa bahwa sebagian besar wilayah Hukum Polsek Muara Jawa terdiri dari kelurahan-kelurahan yang letaknya cukup berjauhan dan terisolir. Hal ini disebabkan karena banyaknya anak sungai sehingga kegiatan Patroli rutin kekelurahan-kelurahan kurang maksimal dilaksanakan Kemudian Polsek Muara Jawa khususnya Unit Lintas kekurangan Personil dalam hal melaksanakan penegakan hukum yang seharusnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat dipolsek Muara Jawa dilakukan 2 kali dalam sebulan dengan cara bekerja sama oleh RT, Tokoh Masyarakat, Sekolah, Perusahaan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya berlalulintas, kemudian memberikan himbauan berupa spanduk yang berisi tentang pentingnya berlalulintas. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalulintas terdapat beberapa kendala yaitu kesadaran masyarakat saat dikmas lalulintas cenderung cuek ataupun kurang memahaminya..

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat kendala dalam meningkatkan ketertiban berlalulintas yang saat ini penertibannya masih dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan Minimnya anggota Unitlantas Polsek Muara Jawa yang ada sekarang yaitu sebanyak 4 orang dikarenakan tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Muara Jawa, sehingga pelaksanaan penegakan hukum harus dibantu dengan unit-unit yang lain. Selain itu kesadaran masyarakat saat dikmas lalulintas cenderung cuek ataupun kurang memahaminya. Kemudian sebagian besar wilayah Hukum Polsek Muara Jawa terdiri dari kelurahan-kelurahan yang letaknya cukup berjauhan dan terisolir. Hal ini disebabkan karena banyaknya anak sungai sehingga kegiatan seperti Patroli rutin kekelurahan-kelurahan kurang maksimal dilaksanakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Unitlantas dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalulintas Masyarakat Pada Polsek Muara Jawa, maka pada bab ini dapat diambil secara garis besar sebagai berikut :

1. Dalam hal registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi yaitu kegiatan yang dilaksanakan Polsek Muara Jawa melalui sarana Kantor Bersama SAMSAT Pembantu yang dalam pelaksanaannya hanya melayani registrasi perpanjangan STNK untuk pembayaran pajak/wajib pajak pertahun serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kemudian Polsek Muara Jawa melaksanakan proses kegiatan kendaraan yang ingin keluar dan masuk ke daerah Muara Jawa dengan membantu masyarakat melaksanakan proses administrasi yang bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Jasa Raharja.
2. Dalam hal penegakan hukum yaitu kegiatan yang fungsinya dikelompokan menjadi 2 (dua) bagian, pertama upaya preventif pada Polsek Muara Jawa telah melaksanakan kegiatan berupa patroli, pengaturan lalulintas serta memberikan himbauan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, yaitu upaya represif pada Polsek Muara Jawa telah melaksanakan kegiatan razia dalam waktu 2/3 kali dalam sebulan, serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalulintas.
3. Dalam hal pendidikan masyarakat tentang lalulintas yaitu kegiatan sosialisasi yang dilakukan 2 kali dalam sebulan dengan cara bekerja sama dengan RT,

Sekolah, Perusahaan, dan Tokoh Masyarakat serta memberikan himbauan (spanduk) yang berisi tentang pendidikan lalulintas.

Daftar Pustaka

- Kurniawan, Agung, 2005. *Teori Administrasi Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Mukhtar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Referensi. Gaung Persada Press Group.
- Moenir, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy, J, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pasolong, Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik*, Cetakan Pertama, Bandung : CV. Alfabeta.
- _____, 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Cetakan Pertama, Bandung : CV. Alfabeta.
- Rivai, Viethzal, 2006. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keempat, Bandung : CV. Alfabeta.
- _____, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedelapan, Bandung : CV. Alfabeta.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soerjono, Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Wirutomo, Paulus, 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi David Berry* (Terjemahan buku *The Principles of Sociology* karya David Berry), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dokumen-Dokumen :

- _____, 2009. *Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- _____, 2009. *Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.
- _____, 2002. *Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- _____, 2003. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- _____, 2010. *Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.
- _____, 2010. *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat..*

Sumber Internet :

www.kamusbahasaindonesia.org/Ketertiban (diakses 10 Maret 2014)

Poerwardaminta, <http://www.slideshare.net/septianraha/analisis-pelaksanaan-kewenangan-pemerintahan-desa-dalam-bidang-kemasyarakatan-di-desa-sumare-kecamatan-simboro-kabupaten-mamuju> (diakses 7 Maret 2014)